

## Studi komparatif reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia

Miftahus Sa'adah \*

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.  
miefsa@yahoo.co.id

\* Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received:

30 May 2019;

Revised:

10 February 2020;

Accepted:

12 February 2020

#### Keywords

Desentralisasi

pendidikan;

Mutu pendidikan;

Reformasi pendidikan

*Educational*

*decentralization;*

*Quality of education;*

*Education reforms*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang program-program reformasi pendidikan di dua Negara dengan latar belakang dan kondisi serta ideologi yang berbeda yaitu Singapura dan Indonesia. Diantara program reformasi pendidikan di Singapura adalah *Teach less, Learn More; Thinking School, Learning Nation*, dan *School Excellent Model*. Sedangkan kebijakan reformasi pendidikan di Indonesia diantaranya diselenggarakan dengan desentralisasi pendidikan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013, serta program sertifikasi guru. Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa Singapura telah berhasil menyelenggarakan reformasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan Singapura yang masuk dalam ranking teratas Negara-negara dengan pencapaian standar pendidikan internasional. Sementara itu, Indonesia nampak masih harus berjuang untuk mencapai tujuan reformasi pendidikan. Hasil implementasi pendidikan yang berbeda di kedua Negara ini tentu dikarenakan perbedaan latar belakang, serta kondisi sosial, ekonomi, politik budaya dan geografis kedua Negara tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan reformasi pendidikan di sebuah Negara.

*This article discusses on educational reformation programs conducted in two countries which have different background as well as different ideology, social, economic, political, and geographical circumstances i.e., Singapore and Indonesia. Some of the main educational reform agendas in Singapore are Teach less, Learn More; Thinking School, Learning Nation, and School Excellent Model. Meanwhile, educational reform programs in Indonesia are conducted through educational decentralization within the framework of school based management, School-level Curriculum and the 2013 Curriculum and teacher certification. It can be understood that Singapore has succeeded in conducting educational reform. This can be seen from the quality of Singapore's education which has been ranked high in achieving the benchmark of international education standard. Meanwhile, Indonesia still needs to struggle to achieve the desired outcomes of educational reforms agendas. The differing result of educational reform revealed in these two countries resulted from different background of the countries. Thus, it can be concluded that there are a number of factors influencing the success of educational reforms agendas in a country.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Globalisasi dan hadirnya era pengetahuan menuntut adanya perubahan dramatis pada karakter dan fungsi pendidikan. Era yang ditandai dengan perubahan serba cepat dan tidak tentu dan bergesernya definisi modal dari kepemilikan barang menjadi kepemilikan pengetahuan dan intelektual mempengaruhi segenap lini dan aspek kehidupan. Kondisi ini mau tidak mau berpengaruh pada kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, dan menuntut adanya reformasi pendidikan. Struktur sekolah dan materi-materi yang diajarkan menjadi usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan serta tantangan zaman yang saat ini berkembang. Untuk meningkatkan keunggulan serta merespon kebutuhan era global bagi terciptanya masyarakat yang kompetitif, reformasi pendidikan yang menyeluruh perlu mendapatkan perhatian dan kebijakan yang serius dari pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, beberapa negara di dunia telah menerapkan berbagai bentuk kebijakan di bidang pendidikan yang diharapkan mampu menjawab tantangan pada perkembangan era globalisasi.

Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat di Tiongkok mengeluarkan kebijakan evaluasi hijau yang merupakan panduan untuk seluruh provinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan serta kebijakan pengurangan beban akademik yang mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar. Di Korea Selatan, pengaruh *College Scholastic Aptitude Test (CSAT)* yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan di Korea Selatan lebih banyak digerakkan oleh lembaga bimbingan belajar. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes yaitu dengan mengadakan razia kepada lembaga bimbingan belajar yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00 dan mendorong universitas untuk melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasarkan pada nilai CSAT. Sementara itu, karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti. Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan *Common Core*. Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun. Guru juga diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat (Baswedan, 2014).

Sementara itu, Singapura sebagai negara maju yang masuk sebagai salah satu naga ekonomi di Asia juga telah menerapkan program-program yang ditujukan bagi reformasi pendidikan seperti penerapan *Teach less Learn More*, *School Excellent Model*, *Thinking School*, dan *Learning Nation* (Lee, Hung, & Teh, 2013; Ng, 2017; Tan & Gopinathan, 2010; Tee Ng & Chan, 2008). Reformasi pendidikan di Singapura tersebut merupakan bentuk upaya perubahan paradigma pendidikan yang dirasa urgen untuk membekali warga negara untuk menghadapi era globalisasi dengan kemampuan berpikir yang kritis (Kadir, 2009). Dengan kondisi politik, sosial, ekonomi dan geografis yang berbeda, Indonesia sebagai negara tetangga Singapura juga telah menerapkan reformasi pendidikan dengan format desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pendidikan dan menyerahkan pengelolaan pendidikan ke level lokal yaitu pada tingkat kabupaten, sehingga diharapkan tujuan dan aktivitas pendidikan akan lebih tepat sasaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan masing-masing daerah (Bjork, 2004; Firman & Tola, 2008; Yeom, Acedo, & Utomo, 2002).

Dengan konteks latar belakang yang berbeda, Singapura dan Indonesia berupaya melakukan reformasi pendidikan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya serta untuk merespon dan menjawab tantangan perubahan zaman. Sebagai negara yang berdekatan secara geografis namun berbeda secara signifikan dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun kondisi geografisnya, penting untuk melihat implementasi kebijakan pendidikan di kedua negara, sehingga dapat diungkap latar belakang penerapan kebijakan-kebijakan tersebut dan lebih lanjut dapat memberikan inspirasi bagi negara-negara yang sedang berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikannya melalui reformasi pendidikan.

Artikel ini membahas upaya reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia dengan terlebih dahulu memberikan ulasan mengenai latar belakang penerapan kebijakan dan deskripsi kebijakan reformasi pendidikan di Singapura dilanjutkan dengan pembahasan mengenai latar belakang reformasi pendidikan di Indonesia dan penerapannya. Selanjutnya disimpulkan bahwa pemahaman mengenai implementasi reformasi pendidikan di suatu negara hendaknya dimulai dari pemahaman tentang latar belakang kondisi dan ideologi negara serta melibatkan analisis yang lebih luas yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kondisi geografis yang melingkupi Negara tersebut.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleog, 2007). Sementara itu, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif analitik yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna serta menelaah masalah yang ada pada masa kini (Sugiyono, 2018). Dengan pendekatan deskriptif analitik, artikel ini mengupas secara komprehensif, obyektif, dan sistematis mengenai implementasi reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap berbagai literature baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun laporan yang berkaitan dengan reformasi pendidikan baik di Singapura maupun di Indonesia (Nazir, 1988). Pengumpulan data dilakukan dengan memilah sumber-sumber referensi dan literature ilmiah yang terkait dengan reformasi pendidikan, latar belakang dan kondisi pendidikan di Singapura dan Indonesia, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia serta kondisi setelah diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, kemudian mengkaji dan menganalisis serta menyajikannya dalam susunan yang sistematis..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Reformasi Pendidikan di Singapura

Berbeda dengan negara-negara lain di Asia yang memiliki sejarah panjang, Singapura adalah negara muda yang baru memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965. Pada tahun 1819, *The British East India Company*, perusahaan dagang Inggris yang berpengalaman melalang buana memutuskan untuk membangun pelabuhan dagang diujung Malaysia yang saat itu masih berupa daerah rawa-rawa yang belum berkembang. Sir Thomas Stamford Raffles, seorang visioner berkebangsaan, memimpin upaya pendudukan di daerah tersebut sehingga pada tahun 1825 Singapura menjelma sebagai sebuah pelabuhan yang sibuk. Selama lebih dari seratus tahun kemudian, Singapura menjadi koloni Inggris dan terus berkembang. Namun, perkembangan tersebut harus terhenti dengan pecahnya Perang Dunia II ketika Jepang menginvasi pada tahun 1942. Singapura yang dianggap sebagai benteng yang tak tertembus di area Pasific jatuh ke tangan Jepang hanya dalam hitungan hari. Selanjutnya Singapura diduduki Jepang selama tiga setengah tahun. Orang-orang Inggris dan Eropa yang saat itu tinggal di Singapura dipenjarakan sedangkan penduduk asli harus menderita bahkan mengalami siksaan yang berakhir pada kematian.

Ketika tentara Jepang mundur pada akhir perang dunia II, penduduk asli Singapura memulai pergerakan kemerdekaannya dan pada 1959 Inggris melepaskan kekuasaannya atas Singapura. Dengan demikian sejarah baru sebagai entitas yang merdeka dimulai. Awalnya, Singapura masih bergabung dengan Malaysia karena ketergantungannya pada pangan, air dan sumber daya alam. Namun, usaha untuk menggabungkan Singapura sebagai bagian dari negara Malaysia tidak membuahkan hasil karena Singapura sebenarnya adalah kota China dimana 70% penduduk Singapura adalah warga keturunan China, 15% warga keturunan India, dan 10% adalah warga keturunan Melayu. Akhirnya pada tahun 1965 Singapura benar-benar berpisah dari Malaysia dan pada tahun inilah sejarah Singapura sebagai sebuah Negara dimulai. Pada saat itu, Negara yang baru lahir ini belum memiliki sistem persekolahan, sistem konstitusi, tentara, angkatan laut maupun sum-

ber daya alam yang memadai. Kekuatan utama negara ini bersandar pada tiga hal yaitu posisi strategis di jalur laut tersibuk, kepemilikan pelabuhan laut terbesar, dan sumber daya manusia. Dari tiga modal inilah Singapura membangun sebuah negara (Koh, 2007).

Dalam perkembangannya, Singapura secara konsisten dapat mencapai kualitas unggul dalam bidang pendidikan. Selama lebih dari empat puluh tahun, Singapura telah melewati beberapa tahapan perkembangan yaitu masa *survival* (1959-1978), efisinesi (1979-1996), kemampuan (1997-2011), dan *studentcentric, values-driven* (2012) (Ministry of Education, Singapore, 2012a dalam Mok, 2008). Selama itu, Singapura sangat memperhatikan keunikan geopolitik dan kurangnya sumber daya alam yang dimiliki. Tahap-tahap tersebut juga merupakan respon dari perkembangan zaman, dimana Singapura selalu berusaha untuk menyesuaikan visi Negara dengan tuntutan zaman (Ng, 2017). Dalam mempersiapkan era baru, pemerintah Singapura secara terbuka menyatakan pentingnya reformasi pendidikan dalam rangka mempersiapkan warga negaranya untuk lebih kompetitif dan kompeten di era global. Gagasan "*Thinking schools, learning nation*" (TSLN) yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong pada Juli 1997 menjadi tema sentral bagi arus utama reformasi pendidikan di Singapura. Konsep "*thinking schools*" berhubungan dengan pendidikan sekolah untuk menanamkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa, sedangkan "*learning nation*" bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan belajar berkelanjutan, sehingga sesuai dengan tantangan perubahan di era globalisasi dan informasi (Mok, 2008). Strategi utama perwujudan gagasan TSLN adalah 1.) Pengajaran secara eksplisit keterampilan berpikir kritis dan kreatif; 2.) Pengurangan konten mata pelajaran; 3.) Revisi model penilaian; dan 4.) Penekanan pada proses bukan pada outcome (Ministry of Education, 1997).

Visi TSLN dianggap sebagai deskriptor komprehensif sistem pendidikan secara keseluruhan untuk menghadapi tantangan abad 21. Singapura dianggap terlalu kecil untuk memberikan pengaruh bagi penciptaan agenda global masa depan dunia, maka kualitas sumber daya manusia menjadi sangat krusial untuk persiapan dalam menghadapi tantangan masa depan. Secara umum, disatu sisi, gagasan TSLN diperkenalkan sebagai upaya reformasi pendidikan dalam rangka merespon perubahan yang muncul karena ekonomi global, serta untuk mempersiapkan Negara dan warganya dalam perwujudan era ekonomi pengetahuan disisi yang lain (Mok, 2008). Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari TSLN, gagasan *teach less, learn more* (TLLM), juga diajukan. Konsep TLLM berfokus pada pedagogi kelas yang mengupayakan agar guru dapat melakukan refleksi tentang cara mengajar di kelas dan apa yang diajarkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa dalam lingkungan yang mendukung budaya berbagi secara terbuka sekaligus menekankan pentingnya mengurangi jumlah materi yang diberikan untuk memberikan ruang bagi aktivitas refleksi. Guru diharapkan melakukan aktivitas refleksi secara mendalam terkait dengan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga dapat memunculkan ide-ide inovatif proses pembelajaran.

Hak untuk melakukan proses pembelajaran ada pada guru dan sekolah dengan tugas sekolah sebagai penyedia dukungan untuk meningkatkan pedagogi guru dalam melibatkan siswa. Pada level sistem, Kementerian Pendidikan Singapura bersifat sangat fleksibel dengan melepaskan kontrol dan memfasilitasi guru dan sekolah dalam melakukan tugasnya. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk menguatkan aktivitas profesional guru dengan penguatan kepemimpinan, kurikulum pembelajaran dan praktik pedagogi guru. Kebijakan TSLN dan TLLM diharapkan dapat menguatkan pengembangan profesionalisme berbasis nilai dalam komunitas mengajar di sekolah, yang didasari oleh identitas guru yang kuat, etos profesional bersama, dan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga diharapkan budaya kolaborasi dan berbagi tanggung jawab antar sesama guru akan menguat, dimana para guru tersebut dapat mengorganisasikan dan mengembangkan diri dalam komunitas yang memelihara keunggulan budaya profesionalisme guru (Low, 2011).

Melalui visi TSLN dan TLLM, sekolah-sekolah di Singapura mempunyai tugas untuk mentransformasi diri menjadi sekolah unggul. Dengan konsep desentralisasi pendidikan, sekolah-sekolah tersebut diberikan otonomi yang lebih luas, sehingga dapat lebih fleksibel dan *responsive* dalam memenuhi kebutuhan siswa. Pemerintah juga mendorong diversifikasi sistem pendidikan untuk mewadahi perbedaan dan keanekaragaman karakteristik siswa. Untuk itu, kepala sekolah didorong untuk menjadi Chief Executive Organization (CEO) di sekolah yang bertugas memimpin anggotanya, mengelola sistem sekolah dan menciptakan inovasi pendidikan (Tee Ng & Chan, 2008)

Untuk mendukung realisasi sekolah unggul sekaligus menjaga jaminan mutu, mulai tahun 2000, model penilaian sekolah mengalami perubahan. Perangkingan sekolah menengah berubah menjadi sistem pengelompokan yang lebih lunak. Namun, yang lebih signifikan saat ini, semua level pendidikan di Singapura, termasuk pada level sekolah dasar, menengah dan lanjutan, diminta untuk melakukan penilaian diri dengan menggunakan konsep The School Excellence Model (SEM). The School Excellence Model (SEM) adalah model penilaian diri sekolah yang diadaptasi dari berbagai model mutu yang digunakan oleh organisasi bisnis, yaitu The European Foundation of Quality Management (EFQM), The Singapore Quality Award (SQA) dan The American Malcolm Baldrige National Quality Award model (MBNQA). Berbagai usaha dilakukan untuk menyelaraskan SEM dengan SQA, sehingga sekolah diharapkan dapat memposisikan diri sesuai dengan pedoman nasional format organisasi unggul.

SEM bertujuan untuk menyediakan alat yang secara obyektif dapat mengidentifikasi dan mengukur kekuatan sekolah dan area yang dapat dikembangkan lebih lanjut. SEM juga memungkinkan dilakukannya *benchmarking* kepada sekolah-sekolah sejenis, menstimulasi aktivitas pengembangan yang dapat secara positif berpengaruh pada peningkatan mutu sekolah yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas sistem pendidikan secara umum. *Core values* SEM menekankan pada pentingnya kepemimpinan sekolah yang berkarakter dengan tujuan yang jelas, penempatan kepentingan siswa sebagai prioritas utama, dan memposisikan guru sebagai kunci utama terwujudnya kualitas pendidikan. SEM mengakui pentingnya proses pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam rangka mencapai hasil yang unggul. SEM juga beranggapan bahwa hasil pembelajaran tidak hanya diukur dan dilihat pada pencapaian akademik semata. Performa akademik sekolah memang penting dan perlu dilanjutkan namun sekolah unggul harus tetap menyediakan pendidikan yang holistik dan berkualitas (Tee Ng & Tan, 2010).

Kerangka kerja SEM terdiri dari dua kategori yaitu *Enablers* (kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu hal) and Hasil. Kategori *Enablers* terdiri dari komponen budaya, proses dan sumber daya yang berhubungan dengan bagaimana hasil yang akan dicapai. Sedangkan kategori hasil, berkaitan dengan apa yang telah dicapai sekolah atau apa yang sedang diupayakan untuk dicapai oleh sekolah. SEM meliputi sembilan kriteria penilaian kualitas sekolah (Ministry of Education, 2000), yaitu: 1.) Kepemimpinan, yaitu bagaimana pemimpin sekolah dan sistem kepemimpinannya mengakomodir nilai-nilai dan fokus pada proses belajar siswa dan keunggulan performa sekolah; dan bagaimana sekolah melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat; 2.) Perencanaan strategis, yaitu bagaimana sekolah merancang dengan jelas arah strategis yang berfokus pada *stakeholder*; mengembangkan rancangan kegiatan untuk mendukung implementasi renstra tersebut, mendistribusikan rancangan dan mengawal performanya; 3.) Pengelolaan staf, yaitu bagaimana sekolah mengembangkan dan memanfaatkan segenap potensi stafnya untuk menciptakan sekolah unggul; 4.) Sumber daya, yaitu bagaimana sekolah mengelola sumber daya internal serta kemitraan eksternalnya secara efektif dan efisien untuk mendukung perencanaan strategis dan implementasinya; 5.) Proses yang berfokus pada siswa, yaitu bagaimana sekolah mendesain, mengimplementasikan, mengelola dan meningkatkan proses utama pembelajaran untuk menyediakan pendidikan holistik dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan diri (*wellbeing*) siswa; 6.) Administrasi dan pencapaian operasional, yaitu apa yang sedang diupayakan untuk dicapai terkait dengan efisiensi dan efektivitas sekolah; 7.) Pencapaian staf, yaitu apa yang sedang diupayakan untuk dicapai terkait dengan pelatihan, pengembangan dan moral staf; 8.) Kemitraan dan pencapaian sosial, yaitu apa yang sedang diupayakan untuk dicapai terkait dengan kemitraan dan komunitas secara luas; dan 9.) Pencapaian performa utama, yaitu apa yang sedang diupayakan untuk dicapai dalam hal pengembangan holistik siswa dan secara khusus dalam hal sejauh mana sekolah mencapai *outcome* pendidikan yang diharapkan.

Dengan demikian, SEM pada dasarnya menggambarkan sebuah sekolah unggul dimana pemimpin mengarahkan staf, merencanakan strategi dan mendistribusikan sumber daya dengan sistematis dan diidentifikasi secara jelas yang ditujukan untuk proses pembelajaran yang berfokus pada siswa dengan merancang target-target, memonitor dan mengelola performanya. Enablers ini selanjutnya dapat menghasilkan kepuasan staf dan *stakeholder* sekaligus memberikan pengaruh pada masyarakat, yang kesemuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan sekolah dan kualitas pendidikan (Tee Ng & Chan, 2008). Ketiga gagasan reformasi pendidikan di Singapura tersebut mampu

menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak diragukan lagi. Pencapaian mutu pendidikan melalui reformasi pendidikan tersebut secara nyata telah berkontribusi pada kemajuan dan stabilitas ekonomi negara, sehingga Singapura menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling kokoh di Asia dengan kualitas sumber daya manusia yang siap berkompetisi dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

#### Reformasi Pendidikan di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 13.000 pulau disepanjang garis ekuator antara Asia dan Australia. Populasinya berjumlah kurang lebih 250 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 3.000 kelompok etnik dan 200 bahasa daerah. Indonesia saat ini menempati posisi keempat negara berpenduduk terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat dan dikategorikan sebagai negara dengan penghasilan menengah ke bawah (World Bank, 2008). Kondisi Indonesia dengan keanekaragaman budaya, bahasa, etnik, dan keagamaan yang dimiliki menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang mengelola negara kepulauan ini. Kenyataan membuktikan bahwa meskipun dengan keanekaragaman tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan sistem sosial, politik, ekonomi yang paling terpusat. Untuk mengatasi hal ini, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan telah menggagas ide untuk mentransfer otoritas dari pusat ke tingkat daerah. Pada awalnya, pemerintah memberikan indikasi bahwa perwakilan pemerintah daerah akan diberikan kepercayaan untuk mengelola otonomi secara luas. Pemberlakuan Undang-Undang Desentralisasi yang pertama pada tahun 1948, yaitu Undang-Undang Dasar tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesan bahwa kekuasaan benar-benar akan didistribusikan ke seluruh daerah. Walaupun politisi dan pejabat memberikan dukungan untuk gagasan desentralisasi, ketiadaan perundangan menghambat rencana untuk menyerahkan otoritas kepada pemerintah daerah (Firman & Tola, 2008). Hal ini berimbas pada ketidaksiapan menyeluruh terhadap penerapan desentralisasi yang berakhir pada pengelolaan Negara dengan sifat yang sangat sentralistik.

Disisi lain, krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1997 berimbas buruk pada perekonomian Indonesia. Walaupun kondisi mulai membaik pada akhir 1998, keraguan pada kemampuan untuk kembali pada posisi ekonomi yang berkembang masih tinggi. Ini berarti bahwa tenaga kerja masih akan mengalami berbagai masalah yang berefek pada keterpurukan sosial dan kesejahteraan keluarga. Dengan peningkatan goncangan politik dengan titik kulminasi lengsernya kepemimpinan orde baru pada Mei 1998, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan diakibatkan oleh terpuruknya nilai tukar Rupiah. Krisis ekonomi yang berimbas parah pada kehidupan sosial mempengaruhi keberlangsungan kesejahteraan keluarga dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja pegawai sekaligus tingginya angka inflasi (Manning, 2000).

Berjuang untuk meminimalisir efek sosial dari krisis, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan anak dan perempuan sebagai pihak yang paling rentan terdampak turunnya pemasukan rumah tangga. Dalam bidang pendidikan, perhatian utama ditujukan kepada angka putus sekolah yang cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan perlunya reformasi pendidikan dalam rangka mengamankan anggaran pendidikan dari efek inflasi. Tiga prioritas utama reformasi pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesetaraan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta penguatan manajemen dan akuntabilitas pendidikan (Firman & Tola, 2008). Diantara gagasan reformasi pendidikan Indonesia yang utama adalah desentralisasi pendidikan dalam format manajemen berbasis sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan sertifikasi guru.

Gagasan desentralisasi dan penyerahan otonomi pendidikan kepada pemerintah daerah merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem pendidikan nasional. Pada dua dekade sebelumnya, pemerintah sebenarnya telah mendorong upaya desentralisasi pendidikan di semua sektor dari kesehatan sampai pada bidang pertanian. Pada tahun 1980an Kementerian Pendidikan Nasional mulai mengevaluasi kemungkinan mendesentralisasikan otoritas ke level sekolah. Pada tahun berikutnya, berbagai program dan kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan tersebut mulai digulirkan. Puncak usaha untuk merekonfigurasi kerangka otoritas adalah

digulirkannya dua Undang-Undang pada tahun 1999 yang memberikan keluasaan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan kabupaten di Indonesia dimulai pada tahun 2001 (Bjork, 2006). Peraturan perundangan ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan, seperti semua sektor pemerintahan lainnya, akan dikelola oleh pemerintah dan pendidik tingkat daerah dan tanggung jawab utama Kementerian Pendidikan Nasional akan bergeser dari fungsi instruksi menjadi fungsi koordinasi.

Setelah krisis ekonomi dan politik yang melanda, reformasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kerangka legal pengembangan pendidikan. Undang-Undang tersebut menjamin bahwa siswa pada tingkat pendidikan dasar dibebaskan dari segala biaya dalam rangka memfasilitasi kemudahan akses pendidikan. Undang-Undang tersebut juga memberikan pedoman standar isi kurikulum, standar proses pendidikan, standar lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar evaluasi pendidikan sebagai rujukan untuk penjaminan dan pengawasan mutu pendidikan. Desentralisasi pengelolaan pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah yang merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan dalam kerangka prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai perwujudan demokrasi pendidikan. Dengan prinsip ini, sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola sekolah secara mandiri dan untuk mendapatkan dukungan penuh dari komunitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah. Desentralisasi pendidikan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah menjadikan komunitas sekolah sebagai partisipan aktif yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan program sekolah termasuk kurikulum dan strategi pembelajaran. Sehingga sekolah dapat menyajikan layanan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa.

Pada era desentralisasi pendidikan ini, perluasan akses dan layanan pendidikan sangat bergantung pada willingness kepemimpinan politik di daerah untuk memberikan dukungan penuh. Maka upaya lebih lanjut untuk menyokong dan memperluas inovasi manajemen berbasis sekolah serta partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan bantuan dari pihak asing menjadi tergantung pada kemauan pemerintah daerah dan tersedianya anggaran untuk mendukung program tersebut. Sementara itu, implementasi manajemen berbasis sekolah pada tingkat sekolah menjadi sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Saat ini, masih terjadi kesenjangan diberbagai daerah dan sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Untuk itu, usaha jangka panjang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah secara efektif.

Selain penerapan manajemen berbasis sekolah, reformasi pendidikan dalam kerangka desentralisasi pendidikan diwujudkan dalam format Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sejak tahun 2006, kurikulum terpusat yang selama berpuluh tahun diterapkan sebagai imbas dari pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik secara perlahan digantikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pada kurikulum sebelumnya, tujuan, isi, metode pembelajaran, dan teknik penilaian ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pada skema baru pengembangan kurikulum, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Standar Pendidikan menentukan standar kompetensi lulusan pada setiap tingkat pendidikan, standar isi kurikulum, dan pedoman pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Selaras dengan standar nasional dan pedoman yang telah ditetapkan, komunitas sekolah dibawah pengawasan pemerintah daerah merancang kurikulum untuk sekolah masing-masing. Strategi pengembangan kurikulum ini menjamin relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Selanjutnya, rasa memiliki komunitas sekolah terhadap kurikulum yang dikembangkan secara mandiri dapat meningkatkan keberhasilan penerapan kurikulum itu sendiri.

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan kebebasan bagi sekolah dan komite sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah, menganalisa lingkungan internal dan eksternal sekolah, serta menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang diinisiasi oleh sekolah. Dengan merujuk pada standar nasional, masing-masing sekolah mengembangkan kurikulum yang memenuhi pedoman yang ditetapkan secara nasional yaitu 80% mengakomodir konten nasional dan 20% untuk memfasilitasi kurikulum lokal. Materi muatan lokal ditentukan oleh komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi siswa yang dirancang berdasarkan ketersediaan sumber daya karakteristik masing-masing daerah dan misi khusus sekolah.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah juga menentukan kalender pendidikan. Disamping itu, kelompok guru dibawah koordinasi kepala sekolah dan komite sekolah menyiapkan silabus mata pelajaran. Untuk menyiapkan pelaksanaan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada konteks kelas, guru juga mempersiapkan rencana pembelajaran. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan fenomena baru bagi sekolah di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, masih banyak ditemukan persoalan-persoalan terkait dengan implementasinya di sejumlah sekolah. Kebebasan sekolah untuk merancang secara mandiri kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikembangkan dan diadopsi sepenuhnya oleh sekolah cenderung menghasilkan kurikulum yang seragam sebagaimana yang terjadi pada masa sentralistik.

Perubahan peran sekolah dari pelaksana kurikulum menjadi pengembang kurikulum justru membingungkan komunitas sekolah. Hal ini terjadi karena peran dan mental sebagai pelaksana kurikulum sudah sedemikian rupa mengendap. Kebiasaan hanya melaksanakan instruksi dari atas masih belum bisa menggantikan peran sebagai pengambil inisiatif. Oleh karena itu, kapasitas komunitas sekolah untuk menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa untuk kemudian mengimplementasikannya dalam kurikulum sekolah perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kebijakan mengenai penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan selanjutnya digantikan dengan penerapan Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada pembentukan karakter siswa yang kuat. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 adalah lahirnya generasi yang kreatif dan inovatif dengan harapan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan peradaban bangsa. Cita-cita ini merupakan respon dan disesuaikan dengan tantangan perubahan zaman yang serba tidak menentu sehingga generasi muda Indonesia perlu dibekali dengan keterampilan pemecahan persoalan serta kreativitas dengan karakter sebagai manusia yang tangguh secara holistik.

Muatan isi pada kurikulum 2013 dirancang dalam tema-tema yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang pada kurikulum sebelumnya bersifat terpisah. Hal ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman siswa yang komprehensif terhadap sebuah fenomena, sehingga keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat dikembangkan sejak dini. Metode pembelajaran yang digunakan adalah inquiri dimana siswa diajak menemukan sendiri jawaban dari berbagai persoalan, sehingga pengetahuan yang didapat menjadi lebih bermakna. Pola pembelajaran yang pada kurikulum sebelumnya bersifat pasif berubah menjadi pembelajaran aktif-mencari yang semakin diperkuat dengan pendekatan saintifik yang mendasarkan pada pemberian pengalaman-pengalaman bermakna bagi siswa. pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) diubah menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat lingkungan alam, sumber atau media lainnya) , serta pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet). Dengan demikian nampak bahwa kurikulum 2013 dirancang untuk merespon tuntutan zaman.

Selanjutnya, reformasi pendidikan yang tidak kalah pentingnya dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan program sertifikasi guru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengindikasikan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional harus memenuhi sejumlah kualifikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai perluasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mensyaratkan dipenuhinya kualifikasi minimum guru, pelaksanaan sertifikasi guru, implikasi dari sertifikasi guru profesional bagi otoritas mengajar, dan hak untuk mendapatkan insentif profesional sebagai penghasilan tambahan. Disebutkan bahwa kualifikasi minimal guru adalah sarjana strata satu di area yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sertifikat mengajar adalah bukti formal untuk diakui sebagai guru yang telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat mengajar pada bidang tertentu. Kompetensi guru terdiri dari empat komponen yaitu: 1.) Kompetensi pedagogi; 2.) Kompetensi personal; 3.) Kompetensi sosial; dan 4.) Kompetensi profesional. Pendidikan dan pelatihan profesi guru diarahkan pada pengembangan keempat kompetensi tersebut. Sertifikat mengajar yang telah didapatkan sebelumnya ketika menyelesaikan studi strata satu di bidang

pendidikan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tsertifikat guru seperti yang dipersyaratkan oleh perundangan baru tersebut. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan mengindikasikan bahwa guru memerlukan tes kompetensi untuk mendapatkan sertifikat guru profesional.

Tujuan pelaksanaan program sertifikasi guru bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui insentif profesional namun juga terutama untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan demikian diharapkan program sertifikasi guru tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan performa guru di kelas, sehingga program sertifikasi guru ini dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam reformasi pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

### SIMPULAN

Berbagai faktor yang meliputi trend dunia global maupun dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun geografis sebuah negara menjadi landasan dan latar belakang digulirkan dan diselenggarakannya reformasi pada bidang pendidikan. Singapura merupakan negara yang masih terbilang cukup muda dengan kondisi geografis yang tidak begitu luas dan sumber daya alam yang minim. Singapura menginvestasikan masa depannya dengan perhatian penuh pada sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang ditujukan untuk menyiapkan generasi mudanya dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus berperan aktif dalam agenda ekonomi global. Sejumlah program reformasi pendidikan Singapura seperti *Thinking School, Learning Nation; Teach Less, Learn More*, dan *School Excellent Model* telah terbukti efektif dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat berperan aktif pada kancah dunia global.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara besar dengan keanekaragaman budaya, etnik, bahasa, dan agama juga memiliki sejumlah program bagi upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Program desentralisasi pendidikan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013, serta program sertifikasi guru yang merupakan beberapa contoh kebijakan yang digulirkan dalam rangka reformasi pendidikan. Namun, berbagai program tersebut nampaknya belum secara efektif mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Besarnya kekayaan sumber daya Indonesia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia justru menjadi tantangan yang lebih bagi terwujudnya reformasi pendidikan, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang serta komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen bangsa untuk secara aktif bekerja sama mewujudkan cita-cita reformasi pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, A. R. (2014, December). Gawat darurat pendidikan di Indonesia. A paper presented at the meeting between Ministry and Head of Education Offices Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Bjork, C. (2004). Decentralisation in education, institutional culture and teacher autonomy in Indonesia. *International Review Of Education*, 50, 245-262. Doi: <https://doi.org/10.1007/s11159-004-2622-6>
- Bjork, C. (2006). Transferring authority to local school communities in Indonesia: Ambitious plans, mixed results. *Educational Decentralization*, 129-147. Doi: [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4358-1\\_9](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4358-1_9)
- Firman, H., & Tola, B. (2008). The future of schooling in Indonesia. *Journal of International Cooperation in Education*, 11(1), 71-84.
- Kadir, M. A. A. (2009). *Rethinking thinking schools, learning nation: Teachers' and students' perspective of critical thinking in Singaporean education* (Unpublished doctoral dissertation). The University of Melbourne, Melbourne.
- Koh, A. (2007). Living with globalization tactically: The metapragmatics of globalization in Singapore. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 22(2), 179-201. Doi: <https://doi.org/10.1355/SJ22-2B>

- Lee, S. S., Hung, D., & Teh, L. W. (2013). Moving Singapore from great to excellent: How educational research informs this shift. *KEDI Journal of Educational Policy*, 10(2), 267-291.
- Low, E. L. (2011). *Paving the fourth way: The Singapore story*. Singapore: National Institution of Education.
- Manning, C. (2000). The economic crisis and child labor in Indonesia. *ILO/IPEC Working Paper*, 14-34. Doi: <https://doi.org/10.1.1.200.9831>
- Ministry of Education Singapore. (1997). *Towards Thinking Schools*. Singapore: Ministry of Education Singapore.
- Ministry of Education Singapore. (2000). *The school excellence model: A guide*. Singapore: The school appraisal branch, schools division. Singapore: Ministry of Education Singapore.
- Mok, K. H. (2008). Positioning as a regional hub of higher education: Changing governance and regulatory reforms in Singapore and Malaysia. *International Journal of Educational Reform*, 17(3), 230-250. Doi: <https://doi.org/10.1177/105678790801700303>
- Moleog, L., J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ng, P. T. (2017). *Learning from Singapore: The power of paradoxes*. Taylor & Francis.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tan, J., & Gopinathan, S. (2010). Education reform in Singapore: Towards greater creativity and innovation?. *NIRA Review*, 7(3), 5-10.
- Tee Ng, P., & Chan, D. (2008). A comparative study of Singapore's school excellence model with Hong Kong's school-based management. *International Journal of Educational Management*, 22(6), 488-505. Doi: <https://doi.org/10.1108/09513540810895426>
- Tee Ng, P., & Tan, C. (2010). The Singapore global schoolhouse: An analysis of the development of the tertiary education landscape in Singapore. *International Journal of Educational Management*, 24(3), 178-188. Doi: <https://doi.org/10.1108/09513541011031556>
- World Bank. (2008). World development indicators database. Retrieved from <http://www.siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/>
- Yeom, M., Acedo, C., & Utomo, E. (2002). The reform of secondary education in Indonesia during the 1990s: Basic education expansion and quality improvement through curriculum decentralization. *Asia Pacific Education Review*, 3(1), 56-68. Doi: <https://doi.org/10.1007/BF03024921>